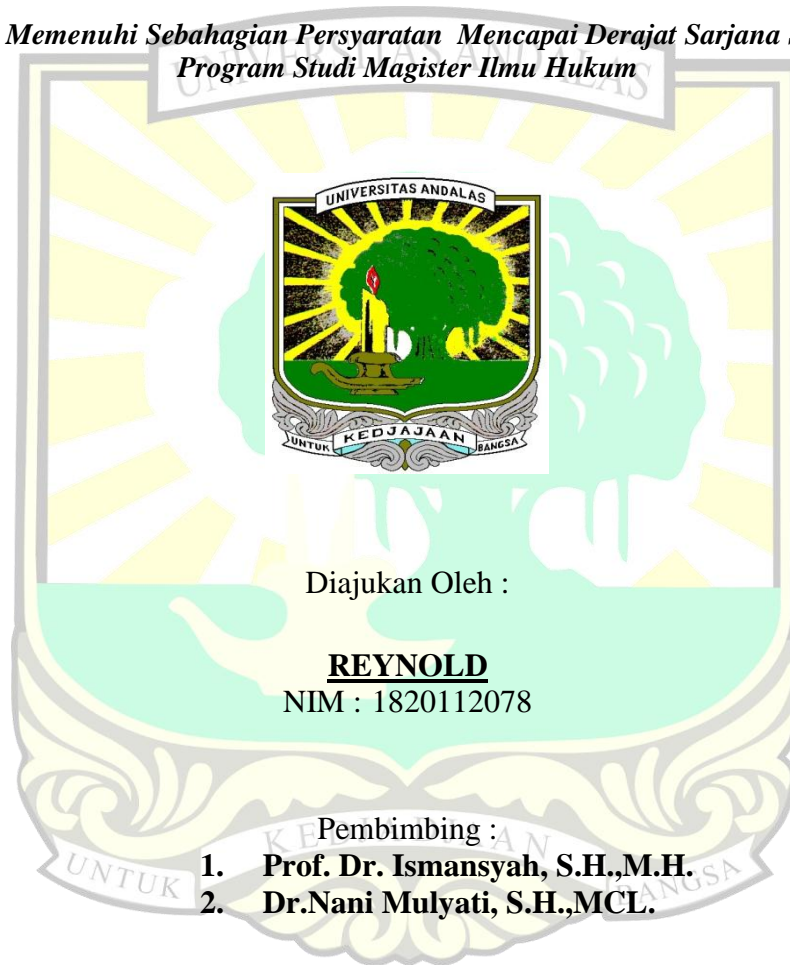


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DIVERSI HAKIM  
DALAM PERKARA ANAK REG. PERKARA NOMOR PDM-16/PARIA-  
ANAK/8/2018**

**TESIS**

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Strata -2  
Program Studi Magister Ilmu Hukum*



Diajukan Oleh :

**REYNOLD**

NIM : 1820112078

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H.
2. Dr.Nani Mulyati, S.H.,MCL.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

## **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DIVERSI HAKIM DALAM PERKARA ANAK REG. PERKARA NOMOR PDM-16/PARIA- ANAK/8/2018**

(Reynold, NIM 1820112078, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
117 halaman, 2020)

### **ABSTRAK**

Salah satu perubahan penting yang diakomodir dalam UU SPPA adalah pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi sehingga dapat meminimalisir anak dari stigma negatif dan menjauhkan anak dari proses hukum yang dapat membebankan psikologis anak. Dalam praktik pelaksanaan upaya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, telah terjadi perbedaan penetapan hakim dalam memberikan penetapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim dalam satu perkara yang sama, di mana pada tahap penyidikan telah tercapai kesepakatan diversifikasi namun hakim menolak melakukan penetapan, sedangkan di tingkat penuntutan dengan dilakukan upaya diversifikasi kembali, hakim menetapkan upaya diversifikasi terhadap anak tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam perkara dengan nomor register PDM-16/Paria-Anak/8/2018 atas nama Arifan Mahesa Als. Harifan Maisa Als. Ipan, Panggilan Ipan. Pada saat kasus tersebut terjadi Ipan berusia 17 tahun. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1. Bagaimanakah Proses Pemeriksaan Perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam penetapan hakim Nomor 2/Diversi/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn?; 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam penetapan Diversi Nomor 2/Diversi/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penyidik dan Penuntut Umum secara prinsip memenuhi prosedur hukum dalam pengupayaan diversifikasi dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Namun kurangnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum membuat hasil penelitian terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum menjadi sumir; 2. hakim kurang memberikan pertimbangan secara non yuridis dan kaku terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta menurut penulis cukup abai dengan tumpang tindih norma yang terjadi sehingga mengakibatkan proses penegakan hukum dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memakan waktu yang lama dan berlarut-larut pada proses pemeriksaan yang lebih tinggi. Untuk perbaikan ke depannya Mahkamah Agung perlu membuat dan memberikan pedoman untuk penetapan permohonan diversifikasi terhadap upaya diversifikasi di tingkat penyidikan dan penuntutan jika diversifikasi yang dilakukan terhadap tindak pidana yang diancamkan dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun di samping ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Serta melakukan peninjauan ulang terhadap Perma Diversi.

**Kata Kunci:** Penetapan Hakim, Diversi, Anak, *Restoratif Justice*

# **JURIDICAL ANALYSIS OF DETERMINATION OF JUDGE DIVERSION IN PERKARA CHILDREN REG. PERKARA NUMBER PDM-16 / PARI- CHILDREN / 8/2018**

(Reynold, NIM 1820112078, Postgraduate Faculty of Law, Andalas University,  
117 Pages, 2020)

## **ABSTRACT**

*One of the important changes accommodated in the SPPA Law is a restorative justice approach that is implemented in a diversified manner to minimize children from negative stigma and keep children away from legal processes that can put a psychological strain on children. In the practice of implementing the diversion of children against the law in the jurisdiction of the Pariaman District Court, there have been differences in the determination of judges in providing the diversion of children against the law. Judges in the same case, where the diversion agreement was reached at the stage of the investigation but the judge refused to make the decision, while at the level of prosecution with diversion efforts carried out again, the judge set a diversion attempt against the child. This can be seen in the case with the PDM-16 / Paria-Anak / 8/2018 register number in the name of Arifan Mahesa Als. Harifan Maisa Als. Ipan, Call Ipan. At the time of the case, Ipan was 17 years old. The problems in this thesis are 1. What is the Process of Case Inspection of children in conflict with the law in the determination of judge Number 2 / Diversi / Pid. Sus-Anak / 2018 / PN Pmn ?; 2. What is the Pariaman District Court Judge's Consideration in determining Diversi Number 2 / Diversi / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Pmn ?. This research is normative juridical research with the problem approach method through the law approach, historical approach, and conceptual approach. The nature of this research is descriptive using secondary data. The results showed that: 1. Investigators and Public Prosecutors in principle fulfill the legal procedures in seeking diversion and handling children who conflict with the law. However, the lack of coordination between investigators and prosecutors has made the results of research on alleged criminal acts committed by children in conflict with the law summary; 2. the judge does not consider in a non-judicial and rigid manner to the provisions of the applicable law, and according to the author is quite ignorant of the overlapping forms that occur to result in the process of law enforcement in the context of legal protection for children in conflict with the law takes a long time and protracted dissolved in the higher examination process, To improve the future is needed The Supreme Court needs to make and provide guidelines for the determination of diversion requests for diversion at the level of investigation and prosecution if the diversion is carried out against a crime that is threatened with a crime over 7 (seven) years besides criminal threats for under 7 (seven) years. As well as conducting a review of Perma on Diversion.*

**Keywords: Judge Determination, Diversity, Children, Restorative Justice**